

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERLINDUNGAN
PENDUDUK SIPIL DALAM SITUASI PERANG MENURUT KONVENSI
JENEWA 1949 (STUDI KASUS KONFLIK BERSENJATA ISRAEL-
PALESTINA DALAM KASUS *OPERATION CAST LEAD* 27 DESEMBER
2008-20 JANUARI 2009)**

Oleh

Gede Genni Nanda Mahardika, NIM 1714101055

Program Studi Ilmu Hukum

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami bentuk pelanggaran terhadap penduduk sipil dalam konflik Israel-Palestina di jalur Gaza pada *Operation Cast Lead* 27 Desember 2008-20 Januari 2009 dan Mekanisme Penegakan hukum terhadap Pelanggaran Perlindungan ditinjau dari Konvensi Jenewa IV 1949. Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan jenis pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Adapun bahan hukum digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang berguna untuk mendapat konklusi yang relevan dengan permasalahan pada penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Bentuk-bentuk pelanggaran terhadap penduduk sipil yang dilakukan oleh Israel terhadap Palestina di Jalur Gaza Pada *Operation Cast Lead* 27 Desember 2008-20 Januari 2009 dapat dikategorikan menjadi dua jenis kategori kejahatan yaitu Kejahatan Terhadap Kemanusiaan (*crimes against humanity*) dan kategori Kejahatan Perang (*war crimes*), 2) Mekanisme penegakan hukum terhadap perlindungan penduduk sipil melalui ICC dapat diselesaikan melalui referensi Dewan Keamanan PBB. berupa yurisdiksi seperti; *Personal Jurisdiction*, *Material Jurisdiction*, *Temporal Jurisdiction* dan, *Territorial Jurisdiction*. Selain itu, ICC juga mengembangkan *Humanitarian Action* dan *Human security* sebagai sarana pengemablian keamanan bagi warga Rohingnya (2) hambatan yang dialami oleh *International Criminal Court* (ICC) dalam upaya penyelesaian kasus Rohingnya ialah tidak diakuinya status kewarganegaraan etnis Rohingnya oleh pemerintah Myanmar, mereka menganggap etnis rohingnya hanyalah imigran ilegal yang masuk di wilayah negara Myanmar. Serta adanya pengaruh prinsip Non-Intervensi yang dianut negara-negara di ASEAN dimana tidak diizinkan campur tangan organisasi internasional atau negara lain dalam permasalahan intern negara dalam hal ini khususnya Myanmar.

Kata Kunci: Perlindungan hukum, Penduduk Sipil, dan Konflik Israel-Palestina

**LAW ENFORCEMENT ON THE PROTECTION OF CIVIL POPULATIONS
IN WAR SITUATION ACCORDING TO THE 1949 GENEVA CONVENTION
(CASE STUDY OF ISRAEL-PALESTINE ARMED CONFLICT IN THE
CASE OF OPERATION CAST LEAD 27 DECEMBER
2008-20 JANUARY 2009)**

By

Gede Genni Nanda Mahardika, NIM 1714101055

Law Departement

ABSTRACT

This study aims to find out and understand the form of violations of the civilian population in the Israel-Palestinian conflict in the Gaza Strip on the Operation Cast Lead December 27, 2008-20 January 2009 and the law enforcement mechanism for protection violations in terms of the Geneva Convention IV 1949. This research is a study Using the normative legal research method using the type of legislation and case approach approach. The legal material is used is primary, secondary and tertiary legal materials that are useful for obtaining conclusions relevant to the problem in this study. The results showed that 1) forms of violations of the civilians carried out by Israel against Palestine in the Gaza Strip on the Operation Cast Lead December 27, 2008-20 January 2009 can be categorized into two types of crime categories namely crimes against humanity (Crimes Against Humanity) and Category of War Crimes, 2) Law enforcement mechanisms against the protection of civilians through the ICC can be resolved through unification council references.

Keywords: *Legal protection, Civilians, and the Israeli-Palestinian Conflict*